

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alamsyah, D., 2011, *Manajemen Pelayanan Kesehatan* (Yogyakarta: Nuha Medika).
- Danawita Sianturi. 2018. *Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat Pada Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Dolok*. Medan Juli 2018. Diakses pada 2018
- Muhammad Imam Abdul Aziz. 2019. *Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang*. Indralaya Juni 2019. Diakses pada 2019.
- Naomi Rahmawati, dkk. 2020. *Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat*. Universitas Medan Area.
- Budi Winarno, 2016, *Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses, dan Studi Kasus Komperatif)*, Yogyakarta : CAPS.
- Aslinda., Ibrahim, Akmal, M., 2018, *Model Kebijakan Publik dan Teori Perubahan Kebijakan*, Yogyakarta: K-Media.
- Abdal, 2015, *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Press.
- Carl Van Horn dan Donak Van Meter, 1975, *Model-model dalam Kebijakan Implementasi*, Bandung: Mutiara.
- Leo Agustino, 2017, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D
Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012, Memahami Penelitian Kualitatif. (Bandung: ALFABETA)

Noor, Juliansyah. 2011. Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya
Ilmiah. Jakarta: Kencana

M.Iqbal Hasan, 2002, Pokok-Pokok Materi Metodeologi Penelitian dan
Aplikasinya (Jakarta: Ghalia Indonesia).

Syahrudin, (2017), Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Studi
Kasus. Bandung: Nusa Media.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kesehatan No. 36 Tahun 2009

Undang-Undang No. 40 Tentang Jaminian Sosial Nasional (SJSN) Tahun 2004

Undang-Undang No. 24 Tentang BPJS Kesehatan Tahun 2011

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan
Kesehatan

Jurnal :

Naomi Rahmawati Br Simbolon, Marlon Sihombing, Heri Kusmanto dan Isnaini
(2020). "Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat". Diakses pada 20
Maret 2022 Pukul 13.25 WIB

Sakti, dkk. "Prospek Pembiayaan Kesehatan Melalui Asuransi Kesehatan Sosial
di Kabupaten Bantul", *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Vol.6 No.3
(diakses 23 Maret 2003 pukul 14.32 WIB), hl. 147.

Triyana, T. “Pemanfaatan Kartu Indonesia Sehat Pada Pelayanan Rawat Inap Puskesmas.” *HIGEIA (Journal of Public Health Research and ...* 4, no. Special 4 (2020): 875–86.

Wati (2020) "*Pengaruh Kebijakan Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Terhadap Konsumsi Islami Rumah Tangga Miskin (Studi Pada Desa Pulau Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu)*". Diakses pada 27 Agustus 2022 pukul 10.15 WIB

Sahriani (2017). "*Implementasi Program Indonesia Sehat Terhadap Masyarakat Miskin Di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa*". Diakses pada 20 Maret 2022 Pukul 15.10 WIB

Website :

Disperkimta. diakses dari <https://disperkimta.bulelengkab.go.id> pada 30 Maret 2022 Pukul 18.00 WIB

Redaksi 3 “Ironis... Warga Miskin Kabupaten Bekasi Terbanyak Berasal Dari Wilayah Bupati Bekasi” diakses pada tanggal 31 Maret 2017 Pukul 11.00

Badan Pusat Statistika Kabupaten Bekasi, diakses dari bekasikab.bps.go.id “Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bekasi (Jiwa) 2018-2020” pada 30 Maret 20.30 WIB

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Fika Rachmalia Esri

NPM : 183112351550159

Program Studi : Administrasi Publik

"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA SEHAT DI KECAMATAN BABELAN KABUPATEN BEKASI"

No	Indikator	Informan Wawancara	Pertanyaan
1.	Standard dan Sasaran Kebijakan	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	<ol style="list-style-type: none">1. Apa yang menjadi standar dan sasaran dari kebijakan Kartu Indonesia Sehat ini ?2. Bagaimana cara agar tujuan kebijakan Kartu Indonesia Sehat dapat terimplementasi ?3. Apa yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan tujuan kebijakan
2.	Sumber Daya	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana sumber daya yang diinginkan dalam pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat ?2. Apakah sumber daya anggaran memadai dalam mengimplementasikan kebijakan Kartu Indonesia Sehat ?
3.	Karakteristik Agen Pelaksana	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana para agen pelaksana menciptakan keselarasan dalam

			<p>melaksanakan kebijakan Kartu Indonesia Sehat ?</p> <p>2. Bagaimana para agen pelaksanan menyampaikan kebijakan Kartu Indonesia Sehat kepada masyarakat ?</p>
4.	Disposisi Para Pelaksanan	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	<p>1. Apakah agen pelaksana mengimplementasikan kebijakan sesuai standar operasional prosedur ?</p> <p>2. Bagaimana pross para agen pelaksana dalam mewujudkan kebijakan Kartu Indonesia Sehat ?</p>
5.	Komunikasi Antar Organisasi	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	<p>1. Apakah ada kendala dengan lembaga atau organisasi yang bekerja sama dalam implementasi kebijakan Kartu Indonesia Sehat ?</p> <p>2. Bagaimana cara agar Komunikasi dan hubungan antar organisasi dengan masyarakat dapat berjalan dengan baik ?</p>
6.	Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik	Sanitarian Muda dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	<p>1. Apakah lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan Kartu Indonesia Sehat ?</p> <p>2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam meimplementasikan kebijakan Kartu Indonesia Sehat ?</p>

Lampiran Hasil Wawancara 1

Nama Informan : Samlawi

Jabatan : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Babelan (TKSK)

Hari/Tanggal : Jumat, 9 september 2022

Apa yang menjadi standar dan tujuan dari Kebijakan Kartu Indonesia Sehat ?

Jawaban :

“Jadi menurut saya yang namanya Kartu Indonesia Sehat itu tujuannya bagaimana caranya biar masyarakat sehat, ini secara umum ya. Tujuannya supaya memudahkan dalam pengobatan warga agar dapat merasakan fasilitas kesehatan tanpa mengeluarkan biaya ”

Bagaimana cara agar tujuan kebijakan Kartu Indonesia Sehat ini dapat terimplementasi ?

Jawaban :

“Pertama harus adanya kesadaran dari masyarakat bahwa KIS ini penting, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Terkadang masyarakat itu kalau sakit baru buat KIS jadi mereka beranggapan bahwa pembuatan KIS ini prosesnya cepat yang dimana pembuatan KIS harus ada persyaratan-persyaratan surat kependudukan ataupun dengan waktu, dikarenakan tidak langsung aktif begitu saja.

Yang kedua harus ada peran aktif dari kelurahan dan kecamatan karena yang sering kita temukan itu banyak warga yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga jadi harus benar benar di lihat dokumen atau berkas mereka yang ingin mendaftar.”

Apa yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan tujuan kebijakan?

Jawaban :

“Faktor utama ya itu karena pembuatan KIS sendiri yang melibatkan beberapa instansi seperti Dinas Kesehatan lalu meliputi Puskesmas, puskesmas menyampaikan ke desa, kelurahan, rt dan rw untuk menyampaikan kepada warga agar dapat membuat KIS, Jadi faktor utamanya itu adanya sosialisasi kepada warga tentang kesadaran kesehatan agar masyarakat atau warga dapat membuat KIS.”

Apakah Sumber Daya Anggaran Memadai dalam mengimplementasikan Kebijakan Kartu Indonesia Sehat ?

Jawaban :

“anggaran KIS di Kecamatan Babelan ini tidak ada karena ini kan program pemerintah jadi Dinas Kesehatan kewenangannya, kalau kecamatan hanya teknsi pembuatan dan pelayanan saja.”

Apakah agen pelaksana mengimplementasikan Kebijakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur ?

Jawaban :

“Kalau kita kan hanya relawan ya sebenarnya pada dasarnya kita itu relawan tidak ada sangkutan dengan KIS ya, secara prosedur warga datang ke kelurahan untuk membuat KIS lalu kelurahan membuat SKTM lalu diketahui oleh pihak kecamatan, diserahkan ke puskesmas agar langsung memberikan ke Dinas Sosial. Kita TKSK sebenarnya tidak ada kaitannya, Cuma kita sebagai relawan sosial yang mana mengurus Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bagi warga yang tidak mengetahui prosedur ini kita bisa membantukan menjelaskan ke warga, terkadang warga kan tidak tahu jadi nanti kita yang mengurus.”

Apakah ada kendala dengan lembaga atau organisasi yang bekerja sama dalam Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat ?

Jawaban :

“Kendalanya paling terkadang warga yang mau membuat KIS tetapi KTP nya mati atau belum update NIK KK nya, pembuatan KIS juga lama karna kan yang daftar bukan satu atau dua orang pasti banyak yang mau daftar, ya ini kendala juga.”

Bagaimana cara agar komunikasi dan hubungan antar organisasi dengan masyarakat dapat berjalan dengan baik ?

Jawaban :

“Biasanya sosialisasi ke kelurahan jadi untuk sosialisasi ke kelurahan si ya tidak harus langsung ke masyarakat artinya ada beberapa tahap, bisa menyampaikan lewat puskesmas, puskesmas menyampaikan di tingkat kecamatan maupun kelurahan, perwakilan kelurahan di sampaikan pembuatam KIS sosialisasinya nanti rt atau rw

yang menyampaikan ke warga atau bisa juga dengan membuat pamphlet yang ada di puskesmas atau dari posyandu juga bisa.”

Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam meimplementasikan kebijakan Kartu Indonesia Sehat ?

Jawaban :

“Penghambatnya itu tidak tersampaikan langsung ke masyarakat atau masyarakat tidak mengentahui KIS ini, KIS ini diperlukan administrasi kependudukan dalam pembuatannya nah kelemahan di daerah kita ini tuh banyak warga yang tidak memiliki KTP atau KTP nya ada tapi NIK KK nya tidak sama. Kalau pendukungnya untuk sosialisasi dari pihak pelaksana dan kesadaran dari masyarakat juga bisa menjadi pendukung dalam hal ini.”

Lampiran Hasil Wawancara 2

Nama Informan : Toni

Jabatan : Anggota Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

Hari/Tanggal : Jumat, 9 September 2022

Bagaimana sumber daya yang diinginkan dalam pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat ?

Jawaban :

“Sumber daya yang diinginkan dalam pelaksanaan KIS ini itu kan sebenarnya usulan dari masing-masing rt atau rw ya, ada KIS PBI dan non PBI, kalo KIS non PBI itu aturannya dia bayar sendiri dan terdaftar di KIS umum, sedangkan KIS PBI untuk orang-orang yang menegah kebawah dan bisa di usulkan dari puskesmas.”

Bagaimana para agen pelaksana menciptakan keselarasan dalam melaksanakan Kebijakan Kartu Indonesia Sehat ?

Jawaban :

“bicara tentang kebijakan itu kan kewenangan dari Dinas Sosial kita hanya sebatas membantu dan hanya mengarahkan gitu kan, sebenarnya kita hanya membantu Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Jadi mengarahkan dan membantu masyarakat yang tidak tahi dalam proses pembuatan KIS ini agar mereka bisa mendapatkan fasilitas kesehatan”

Bagaimana peran agen pelaksana menyampaikan Kebijakan Kartu Indonesia Sehat kepada masyarakat ?

Jawaban :

“Dengan cara sosialisasi, jadi Dinas Kesehatan ini kan punya targer sekian persen warga Kabupaten Bekasi harus punya KIS di sampaikan ke Puskesmas, puskesmas menyampaikan ke pemerintahan desa atau kelurahan lalu di beritahu ke rt dan rw, supaya rt dan rw setempat menginformasikan ke warganya agar daftar KIS agar bisa mendaptak fasilitas dan pelayanan kesehatan.”

Bagaimana proses para agen pelaksana dalam mewujudkan Kebijakan Kartu Indonesia Sehat ?

Jawaban :

“ Melalui informasi dengan cara kelurahan menginformasikan kepada warga yang belum punya KIS, dengan cara sosialisasi juga bisa mewujudkan program KIS di Kecamatan Babelan”

Lampiran Hasil Wawancara 3

Nama Informan : Nurlaeli S.K.M

Jabatan : Sanitarian Muda Pegawai Puskesmas Kecamatan Babelan

Hari/Tanggal : Jumat, 9 September 2022

Apakah lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi proses pelaksanaan Kebijakan Kartu Indonesia Sehat ?

Jawaban :

“Sangat mempengaruhi, , sebab bagaimana dia memiliki kesadaran bahwa kesehatan itu penting untuk persiapan mereka dalam menggunakan KIS ini, kalau masyarakatnya sadar ya pasti perlu menggunakan fasilitas kesehatan ini.”

Lampiran 4

Surat Permohonan Penelitian dari Kampus

 UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TERAKREDITASI BAN-PT
Jl. Sawo Manis No. 61, Pajaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Telp. (021) 78737624, 7808700 Ext.146, Fax. 7802718-7802719
Homepage : <http://www.unas.ac.id> Email : info@unas.ac.id

Nomor : 171/WD/VI/2022 Jakarta, 2022
Lamp : -
Perihal : Permohonan Penelitian dan Informasi Data

Kepada Yth : Bapak Kepala Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi

Dengan hormat,

Bersama ini kami perkenalkan dengan hormat mahasiswa di bawah ini:

Nama : Fika Rachmalia Esri
Nomor Induk Mahasiswa : 183112351550159
Prodi/Konsentrasi : Administrasi Publik
Alamat Rumah : Perum Vila Gading Harapan Blok D1 No.25, Jalan Sunan Ampel II, RT/RW : 03/035, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
HP : 0895361463953

Mahasiswa tersebut bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul : Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, Dengan Dosen Pembimbing : Drs. Didit Setiabudi, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan bantuan seperlunya. Demikian atas perhatiannya dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan,

Dr. Bhakti Nur Avianto, M.Si

Program Studi : Ilmu Politik - Hubungan Internasional - Sosiologi - Administrasi Publik - Ilmu Komunikasi

Lampiran 5

Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi

	PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Instagram: kesbangpolkabekasi Email: badankesbangpol.kab.bekasi@gmail.com BEKASI	
		Bekasi, 15 Juni 2022
Nomor	: HM.04.04/ 619 /Bakesbangpol/2022	Kepada
Sifat	: Biasa	Yth. Camat Babelan Kabupaten Bekasi
Lampiran	: -	di-
Perihal	: Surat Keterangan Penelitian	BEKASI
<p>Menindaklanjuti surat dari Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional, Nomor Surat: 493/WD/VI/2022, tanggal 08 Juni 2022, perihal: Permohonan Penelitian dan Informasi Data, berkenaan hal tersebut di atas dengan ini menerangkan bahwa :</p> <p>N a m a : FIKA RACHMALIA ESRI Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 09-10-2000 NIM : 183112351550159 Jenjang/ Program Studi : Strata 1 (S.1) / Administrasi Publik Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Perguruan Tinggi / Universitas : Universitas Nasional Pekerjaan : Mahasiswa Alamat Rumah : Villa Gading Harapan RT/RW. 003/035 Kel/Desa Bahagia Kec. Babelan Kabupaten Bekasi No. Telp/ HP / Email : 0895-3614-63953/ rachmaliafika@gmail.com</p> <p>Bermaksud akan mengadakan Penelitian, Pengumpulan Data dan Wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) DI KECAMATAN BABELAN KABUPATEN BEKASI" yang akan dilaksanakan di lingkungan dan wilayah kerja Bapak/Ibu pimpin, adapun waktu pelaksanaan mulai tanggal 15 Juni s/d 15 Juli 2022, apabila berkenan mohon kiranya kepada yang bersangkutan diberikan kemudahan, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan sepanjang tempat penelitian memberikan izin;2. Melaporkan kedatangan kepada Instansi dimaksud dengan menunjukan surat ini;3. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan tujuan akademik;4. Apabila diatas tanggal 15 Juli 2022 kegiatan penelitian belum selesai, agar menyampaikan permohonan perpanjangan oleh instansi pemohon ditunjukan kepada Pj. Bupati Bekasi cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi;5. Setelah selesai melaksanakan kegiatan penelitian wajib melaporkan hasilnya kepada Pj. Bupati Bekasi Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi;6. Surat ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas. <p>Demikian agar maklum terima kasih.</p>		
		<p>Ditandatangani secara elektronik oleh : a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BEKASI PI. SEKRETARIS</p> <p>PONLIAN, S.Pd., MM. Pembinas NIP. 19640603 198903 1 009</p>

Tembusan : disampaikan kepada :

1. Yth. Pj. Bupati Bekasi (sebagai laporan);
2. Yth. Dekan FISIP Universitas Nasional Jakarta.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsE) Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 6

Dokumentasi



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Samlawi selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Bapak Toni selaku Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi



Dokumentasi wawancara dengan Ibu Nurlaeli, S.KM selaku Sanitarian Muda Pegawai Puskesmas Kecamatan Babelan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Fika Rachmalia Esri

NPM : 183112351550159

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 9 Oktober 2000

Alamat : Perum Vila Gading Harapan Blok D1 No.25 Jl. Sunan
Ampel II RT/RW: 03/035, Kelurahan Bahagia, Kecamatan
Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

E-mail : rachmaliafika@gmail.com

Nomor Telepon : 087711264627

Data Pendidikan

2005-2006 : TK Islam Terpadu RA At-Taqwa 33, Bekasi

2006-2012 : SDN Bahagia 03, Bekasi

2012-2015 : SMPN 3 Babelan, Bekasi

2015-2018 : SMPN 3 Babelan, Bekasi

2018-Sekarang : Universitas Nasional, Jakarta Selatan

